

# I. PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara tropis yang mempunyai kemampuan sumber daya hutan yang lumayan besar serta tersebar di segala daratannya pada masing-masing daerah. Namun dari tahun 1996-2000 kerusakan hutan di Indonesia  $\pm$  2 juta hektar pertahun dan pada rentang 10 tahun berikutnya, kerusakan hutan mencapai 1,5 juta hektar pertahun dan selanjutnya pada tahun 2009-2013 tercatat kerusakan hutan mencapai 1,1 juta hektar pertahun (FWI, 2014). Dataran yang ditutupi oleh hutan mempunyai nilai ekonomi selaku dasar pembangunan nasional. Terdapatnya pembangunan daerah sebagai landasan dari pembangunan nasional yang turut memberikan dampak terhadap pola pembangunan sub sektor kehutanan. Hal ini disebabkan dalam masa otonomi daerah, masing-masing daerah dituntut untuk bisa mengoptimalkan sumberdaya alam yang dimiliki supaya sumber-sumber penerimaan daerah bisa digali guna meningkatkan pembangunan daerah (Prasetyo *et al.*, 2017).

Terjadinya kerusakan hutan dari tahun ke tahun akibat eksploitasi kayu hutan secara tak terkendali dan perubahan fungsi kawasan hutan yang sangat masif. Dampak dari kerusakan hutan yang terus menerus di Indonesia dari sisi ekonomi adalah semakin menurunnya dari tahun ke tahun kontribusi sub sektor kehutanan terhadap ekonomi Indonesia. Pada tahun 1999 kontribusi sektor kehutanan terhadap PDB Indonesia yaitu 1,26%. Kontribusi sektor kehutanan dalam penerimaan devisa pada tahun 1992-1997 tercatat sebesar US\$ 16,0 milyar, atau sekitar 3,5 persen dari PDB nasional. Meskipun kontribusi sektor kehutanan terhadap total nilai tambah nasional (Produk Domestik Bruto) menurun dari 4,3 persen pada tahun 1993 menjadi 2,3 persen pada tahun 2002, namun nilai tambahnya meningkat dari Rp. 14,1 triliun menjadi Rp. 36,2 triliun. Pada tahun 2011 turun menjadi 0,70% dan tahun 2016 menjadi 0,69% terhadap PDB Indonesia (Badan Pusat Statistik Indonesia, 2017). Kecilnya kontribusi sub sektor kehutanan terhadap PDB ini disebabkan karena penerimaan hanya dihitung dari komoditi primer saja seperti kayu, rotan, jasa kehutanan dan lainnya (Prasetyo *et al.*, 2017).

Kontribusi hutan produksi terhadap ekonomi Indonesia pada tahun 2019 dapat dikatakan menurun. Dari PNBP pada tahun 2019 tercatat penerimaan sebesar 2,73 triliun rupiah, lebih kecil dari tahun 2018 yang mencapai 2,86 triliun rupiah. Produksi kayu bulat pada tahun 2019 dari hutan alam sebanyak 6,77 juta m<sup>3</sup>, HTI sebanyak 36,23 m<sup>3</sup>. Jumlah tersebut produksinya menurun dari tahun 2018, yang mana dari hutan alam memproduksi kayu bulat sebesar 8,60 juta m<sup>3</sup>, HTI sebesar 40,14 juta m<sup>3</sup>. Tingkat investasi juga menurun, tahun 2019 nilai investasi sebesar 128,14 triliun rupiah, sedangkan tahun 2018 lebih besar yaitu 155,71 triliun rupiah. Namun demikian, terdapat kenaikan dari produksi hasil hutan bukan kayu (HHBK). Tahun 2019 mencatat produksi dari hasil hutan non kayu ini naik secara signifikan yaitu sebesar 474.198 ton dari sebelumnya tahun 2018 yang hanya sebesar 329.633 ton. Ekspor hasil hutan pada tahun 2019 juga sedikit meningkat yaitu senilai 11,64 milyar dolar Amerika, sedangkan tahun 2018 senilai 11,27 milyar dolar Amerika. Tenaga kerja yang terserap dari kegiatan hutan produksi mencapai angka 388.974 tenaga kerja, tidak beda jauh dibandingkan dengan tahun 2018 sebanyak 382.279 tenaga kerja (KLHK, 2020).

Sumberdaya hutan mempunyai peranan penting dalam mendorong kontribusi pendapatan daerah termasuk Kabupaten Sarolangun. Hal ini dimaksudkan untuk menurunkan ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat, dengan cara meningkatkan kemampuan daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan daerah secara intensifikasi maupun ekstensifikasi sehingga daerah dapat membiayai pembangunan daerahnya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan intensifikasi dapat berupa memperluas basis penerimaan, memperkuat proses pemungutan, meningkatkan pengawasan dan meningkatkan efisiensi administrasi dan menekankan biaya pemungutan pajak dan retribusi daerah. Sedangkan dalam pelaksanaan ekstensifikasi kegiatan yang dilakukan berupa menciptakan daya tarik dan iklim kondusif bagi investor yaitu dengan mempromosikan potensi dan keunggulan daerah, memberikan kemudahan bagi investor lokal maupun asing dengan menghilangkan birokrasi yang berbelit-belit, dan peningkatan objek pajak dan retribusi daerah dengan cara menggali dan mendata lagi obyek-obyek pajak dan retribusi daerah yang bisa dikenakan pajak maupun retribusi daerah (Rahmi, 2013). Penyerapan tenaga kerja

dapat memberikan peluang kesempatan kerja bagi masyarakat agar dapat meningkatkan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat sehingga perekonomian daerah dapat berkembang. Dalam upaya mengembangkan perekonomian daerah dapat melalui peningkatan penerimaan daerah yang bersumber dari PAD bisa berasal dari potensi sumberdaya hutan yang dimiliki daerah.

Kabupaten sarolangun memiliki kawasan hutan dengan luas 253.086,60 Ha yang terdiri dari hutan produksi tetap 99.851 Ha, hutan produksi terbatas 89.357,87 Ha, hutan konservasi 8.883,74 Ha dan hutan lindung 54.285,20 Ha (Badan Pusat Statistik Sarolangun, 2020). Dengan luas kawasan hutan yang terletak di Kabupaten Sarolangun saat ini dapat mempengaruhi pembangunan ekonomi daerah. Kabupaten Sarolangun memiliki banyak potensi sumberdaya hutan yang cukup memadai untuk mendorong perekonomian daerah, salah satunya terdapatnya beberapa lokasi Goa-goa tempat bersarangnya Burung Walet yang merupakan kekayaan alam sejati dan sangat bermanfaat bagi manusia serta mempunyai nilai ekonomis yang cukup tinggi, sehingga dapat memberikan pengaruh terhadap pendapatan daerah Kabupaten Sarolangun. Dalam hal ini, timbul kebijakan-kebijakan baru dalam sektor kehutanan khususnya di Daerah Kabupaten Sarolangun mengenai Peraturan Daerah (PERDA) tentang redistribusi izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet. Kabupaten Sarolangun juga memiliki kesempatan kerja yang tinggi. Hal ini dapat dilihat dari jumlah pencari kerja yang terdaftar di Kabupaten Sarolangun pada periode tahun 2012-2018 terus meningkat. Sektor yang paling dominan menyerap tenaga kerja yaitu sektor pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan. Penduduk Kabupaten Sarolangun sebagian besar memiliki pencaharian utama di sektor pertanian, kehutanan, perburuan, dan perikanan yaitu sebanyak 55,99% (BPS Sarolangun, 2019)

Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun dalam meningkatkan pendapatan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah pada 4 tahun terakhir mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2012 sampai 2016. Namun pada tahun selanjutnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sarolangun sampai saat ini mengalami fluktuasi (BPS Sarolangun, 2020). Pendapatan Asli

Daerah ini diperoleh baik dari sektor pertanian, pertambangan, peternakan, perkebunan, pariwisata, dan kehutanan serta peningkatan PAD juga diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pendapatan daerah dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah (Pemerintah Kabupaten Sarolangun, 2017). Namun dalam melaksanakan desentralisasi kendala utama yang dihadapi Pemerintah Daerah dalam peningkatan PAD yaitu minimnya pendapatan yang bersumber dari PAD. Hal ini dikarenakan masih belum tergalinya potensi pendapatan daerah pada umumnya, disebabkan oleh faktor kurangnya kepekaan Pemda dalam menemukan keunggulan budaya dan potensi PAD, kepatuhan dan kesadaran wajib pajak/retribusi yang relatif rendah, lemahnya sistem hukum dan administrasi pendapatan daerah, kelemahan aparatur, kekhawatiran birokrasi akan kegagalan dalam menjalankan programnya, dan ketidakoptimisan akan hasil yang mungkin dicapai (Horota *et al.*, 2017). Oleh karena itu, bila dalam kegiatan pemanfaatan sumberdaya hutan bisa lebih optimal, maka bisa meningkatkan kontribusi sub sektor kehutanan dengan cara menggali potensi-potensi yang ada, sehingga dapat dijadikan sebagai sumber penerimaan daerah. Serta peningkatan penyerapan tenaga kerja dapat memberikan makna angka pengangguran yang menurun. Penyerapan tenaga kerja dari sektor kehutanan dapat membuka peluang kesempatan kerja bagi masyarakat. Untuk mengetahui kontribusi hutan yang dimiliki Kabupaten Sarolangun perlu dilakukan penelitian dalam rangka mengetahui potensi sektor kehutanan yang terdapat di Kabupaten Sarolangun terhadap pendapatan daerah dari sub sektor kehutanan serta kontribusi sektor kehutanan terhadap kesempatan kerja masyarakat di Kabupaten Sarolangun.

Maka perlu dikaji lebih lanjut mengenai besarnya kontribusi sub sektor kehutanan terhadap pendapatan daerah dan kesempatan kerja Kabupaten Sarolangun, berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“Kontribusi Sub Sektor Kehutanan Terhadap Pendapatan Daerah dan Kesempatan Kerja Di Kabupaten Sarolangun”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Pada era otonomi daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk membuat kebijakan yang sesuai dengan kondisi daerahnya. Pemerintah daerah dituntut untuk dapat menggali sumber-sumber potensial bagi keuangan daerahnya

sehingga dapat meningkatkan pembangunan ekonomi daerah. Permasalahan yang menyebabkan masih kurangnya keberhasilan dalam pembangunan ekonomi daerah adalah tingginya tingkat pengangguran. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, perlu menciptakan kesempatan kerja baru dan merangsang peningkatan kegiatan ekonomi. Kesempatan kerja yang tersedia dan kualitas tenaga kerja yang digunakan akan menentukan proses pembangunan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Perbedaan karakteristik yang dimiliki oleh setiap daerah seperti kekayaan sumberdaya alam, sumberdaya manusia, pranata sosial dan unsur-unsur lainnya akan memberikan pengaruh terhadap perbedaan pendapatan dan kesempatan kerja pada masing-masing daerah. Berdasarkan yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Berapa besar Kontribusi Sub Sektor Kehutanan terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Sarolangun ?
2. Berapa besar Kontribusi Sub Sektor Kehutanan terhadap Kesempatan Kerja di Kabupaten Sarolangun ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk :

1. Menguraikan besaran kontribusi sub sektor kehutanan terhadap pendapatan daerah Kabupaten Sarolangun.
2. Menganalisis besar kontribusi sub sektor kehutanan terhadap kesempatan kerja di Kabupaten Sarolangun.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan informasi mengenai kontribusi sektor kehutanan Kabupaten Sarolangun terhadap pendapatan daerah dan kesempatan kerja sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan bagi Dinas Kehutanan dan Pemerintah Kabupaten Sarolangun yang dapat dikaitkan dengan perencanaan pembangunan kawasan hutan dan daerah di Kabupaten Sarolangun.